

PLURALITAS AGAMA DAN KEKERASAN KOLEKTIF

(Perspektif Sosiologi Agama)

Oleh Muh. Yunus

Penulis adalah Dosen Muda STAIN Malang, Sekjen. Lembaga Studi dan Pengembangan Umat GNOSIS Malang, Dewan Redaksi Jurnal Lintas Agama "Toleransi", dan anggota Lembaga Kajian Agama dan Kebudayaan "Salsabila" Malang.

Kesan indah tentang pluralitas kehidupan beragama di Indonesia, pernah dilontarkan oleh Prof. Mohammed Arkoun ketika pada bulan Nopember 1992 berkunjung ke negeri kita. Ia berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri seminar "International Conference of Cultural Tourism" di Yogyakarta, dan sempat memberi ceramah di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Dengan penuh kekaguman, ia menyebut bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tipikal Qur'anik (M. Amin Abdullah, 1999: 19, catatan kaki No. 6). Kesan ini menunjukkan, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sangat terhormat dan dikagumi oleh dunia internasional dalam hal kerukunan antar umat beragama.

Tetapi belakangan ini, kesan itu penuh paradok. Kesan negatif itu tampak seperti apa yang diungkapkan oleh Dr. H. Agiel Siradj, MA. dalam ceramah ilmiahnya di STAIN Malang baru-baru ini (29/7/2000). Ketika ia berkunjung ke belahan dunia muslim lain, bangsa Indonesia di mata negara Iran misalnya, dianggapnya sebagai bangsa kanibal. Boleh jadi, selain Iran juga tidak jauh berbeda kesannya terhadap In-

donesia. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan, mengapa bangsa yang tempo dulu dikenal sangat santun dan beradab kini tiba-tiba berubah menjadi beringas seperti bangsa Barbarian. Bangsa Afrika Selatan saja

yang dulu dikenal tidak pernah sepi dari tindak kekerasan akibat perbedaan etnis yang sangat menonjol (*apartheid*), pada akhirnya dapat didamaikan dengan kehadiran Nelson Mandela sebagai tokoh Rekonsiliasi Nasional. Ironisnya, kini Indonesia justru belajar bagaimana melakukan Rekonsiliasi Nasional dari pengalaman Afrika Selatan itu.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan dimuka, pokok persoalan yang ingin penulis kupas dalam makalah ini adalah: apakah ada fungsi laten agama yang dapat memicu tindakan anarkisme kolektif? Apakah ada sesuatu yang dapat menggerakkan orang sehingga ia melakukan kekerasan kolektif?. Bukankah mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama-agama yang semuanya cinta damai? Dari pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah, tulisan ini mengalir.

mengapa bangsa yang tempo dulu dikenal sangat santun dan beradab kini tiba-tiba berubah menjadi beringas seperti bangsa Barbarian. Bangsa Afrika Selatan saja yang dulu dikenal tidak pernah sepi dari tindak kekerasan akibat perbedaan etnis yang sangat menonjol (*apartheid*), pada akhirnya dapat didamaikan dengan kehadiran Nelson Mandela sebagai tokoh Rekonsiliasi Nasional. Ironisnya, kini Indonesia justru belajar bagaimana melakukan Rekonsiliasi Nasional dari pengalaman Afrika Selatan itu.

Fungsi Manifes dan fungsi Laten Agama

Pada dasarnya, semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup dalam kedamaian. Bahkan agama muncul, baik secara teologis maupun sosiologis adalah guna menyantuni dan menyelamatkan anak manusia; menunjukkan jalan-jalan kedamaian dan keselamatan, menghilangkan ketidakpastian dan mendatangkan ketenteraman, mengajarkan kasih sayang diantara sesama manusia, makhluk lain dan lingkungan hidupnya, menyucikan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, tercela atau merusak dan sebagainya (Sayyid Qutb dalam Azyumardi Azra, 1996: 182).

Melalui kacamata sosiologis, ditemukan bahwa secara umum agama hadir baik secara individual maupun sosial memiliki dua fungsi. *Pertama*, Thomas F. O'dea menyebut fungsi transendensi. Yakni sesuatu yang membuat pengalaman sehari-hari menjadi transenden; *kedua*, agama bersifat profetis, yaitu agama menjadi pembimbing manusia dalam menjalani kehidupannya. Sementara dalam pandangan Durkheim, fungsi sosial agama adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang sudah ada, baik terhadap kesatuan dan solidaritas sosial (Suprayogo dalam M. Yunus, 2000: 46). Lebih rinci D. Hendro Puspito, O.C. menyebutkan bahwa ada lima fungsi agama bagi manusia dan masyarakatnya, yakni: fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi kontrol sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif (D. Hendropustpito, O.C., 1994: 38-56).

Bila kita perhatikan, agama sebagai suatu institusi sosial memiliki fungsi-fungsi positif sebagaimana disebutkan di muka. Fungsi-fungsi positif itulah yang oleh Robert K. Merton disebut sebagai fungsi manifes, yakni fungsi yang diharapkan (*intended*). Sedangkan fungsi laten adalah sebaliknya, yaitu fungsi yang tidak diharapkan (George Ritzer, terj. Alimandan,

1992: 27). Dalam sejumlah masyarakat, fungsi manifes agama meliputi pengendalian negara secara aktual, seperti di Iran, di mana *Shah* digantikan oleh *theocracy* yang dikendalikan oleh para *ayatullah* Muslim (Paul B. Horton & Chester L. Hunt, terj. Aminuddin Ram dan Titi Sobari, 1996: 310).

Fungsi yang tidak diharapkan atau disfungsi terlihat dari adanya pertentangan yang membahayakan keutuhan masyarakat tidak jarang bersumber pada faktor agama. Konflik antara kaum Katolik dan Protestan di Irlandia Utara, antara kaum Sikh dan kaum Hindu di Negara bagian Punjab, antara kaum Muslim dan kaum Hindu di Ayodhya, antara orang Palestina yang beragama Islam dan orang Israel yang beragama Yahudi, antara kaum Kristen dan kaum Muslim di Nagorno-Karabach dan antara kaum Syiah dan kaum Sunni di Irak menunjukkan bahwa adanya agama berlainan atau aliran berbeda dalam agama yang sama dalam satu masyarakat dapat membahayakan keutuhan masyarakat tersebut (Kamanto Sunarto, 1993: 166-167).

Bagi masyarakat Indonesia yang sangat plural, perbedaan antara suku, etnis, budaya, bahasa, antar golongan, dan agama, menyebabkan penghayatan dan pengalaman keagamaan bangsa Indonesia unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Fenomena semacam ini, di satu sisi merupakan modal dasar yang dapat memperkaya dinamika keagamaan yang positif, namun di pihak lain dapat menjadi hambatan dan mengancam kelangsungan kita dalam beragama sekaligus berbangsa... (Said Agiel Siradj, 2000: 9). Faktor-faktor inilah yang acapkali menjadi pemicu kekerasan kolektif berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Agama dan Akar Kekerasan Kolektif

Kekerasan yang terus beruntun terjadi di

tengah masyarakat kita sejak bergulirnya reformasi, benar-benar membuat manusia yang berakal sehat dan berhati nurani tersentak kaget. Para pecinta damai seakan tak percaya, bahwa mayoritas masyarakat pemeluk agama yang dulu tampak tenang, ternyata menyimpan virus sosial yang dahsyat.

Situbondo, Tasikmalaya, Sanggau-Ledo, Rengasdengklok, Timtim, Jakarta, Solo, Karawang, Medan, Ambon, Sambas, dan lain-lain adalah kota yang pernah membara (dalam arti denotatif) karena agresivitas massa. Mengamuknya massa telah menimbulkan korban materiil yang tak terhingga banyaknya. Dan yang terpenting, kerusakan demi kerusakan tersebut mengakibatkan kerugian moril yang substansial bagi upaya menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa (Muhammad Sofyan, 1999: 42-43).

Banyak para analisis yang dikemukakan oleh para cendekiawan untuk mencari akar kekerasan kolektif tersebut. Bagi para agamawan dan pemerhati sosial keagamaan, pada umumnya berpendapat bahwa kekerasan kolektif muncul karena adanya kedangkalan pemahaman terhadap agamanya, sehingga melahirkan *truth claim* yang tidak fair. Nurcholish Madjid misalnya (Andito, ed., 1998: 155) memandang bahwa meninggalkan kemutlakan (absolutisme) adalah jalan menuju perdamaian. Lebih lanjut Armahedi Mahzar (Andito, ed., 1998: 15) melihat adanya lima penyakit yang biasanya menghinggapi aktivis keagamaan, yaitu: absolutisme (kesombongan intelektual), eksklusivisme (kesombongan sosial), fanatisme (kesombongan emosional), ekstremisme (berlebih-lebihan dalam bersikap), dan agresivisme (berlebih-lebihan dalam tindakan fisik).

sosial), fanatisme (kesombongan emosional), ekstremisme (berlebih-lebihan dalam bersikap), dan agresivisme (berlebih-lebihan dalam tindakan fisik).

Sisi lain ada yang melihat akar masalahnya adalah berpangkal pada kesalahan misi atau dakwah suatu agama. Seperti apa yang dikatakan oleh Victor I. Tanja, bahwa dalam situasi Indonesia yang seperti ini, maka yang lebih penting bukan lagi misi atau dakwah untuk menambah jumlah dalam artian kuantitatif; namun tujuan misi atau dakwah adalah menciptakan umat sebagai manusia yang tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian (Andito, ed., 1999: 73). Hal ini dikuatkan oleh Romo YB. Mangunwijaya, bahwa yang penting itu iman, bukan agama. Masalahnya adalah soal kedewasaan cara memandang agama. Agama itu eksklusif, memang demikian karakternya. Agar tidak eksklusivistik, diperlukan iman dalam beragama. Sebab, iman itu inklusivistik, merangkul. Iman merupakan tujuan atau sasaran orang beragama.

Agama itu hanya jalan saja (Andito, ed., 1999: 387). Kalau dikemukakan dalam bahasa populer, pandangan Romo Mangun ini identik dengan jargon John Naisbit: *Spirituality Yes, Organized Religion No*. Pun sama pula dengan jargon Nurcholish Madjid beberapa tahun yang lalu sebelum era Reformasi bergulir: *Islam Yes, Partai Islam, No*.

Dalam bagian lain, Romo Mangun mensinyalir adanya keterkaitan antara kekerasan kolektif dengan istilah "amuk" massa. Kata "amuk" orisinil kosa kata masyarakat Jawa/Nusantara. Menurutnya, kata ini mengacu

kepada suatu bentuk amarah naik pitam, emosional, irrasional, dan sangat aneh. Seolah-olah mata orang buta karenanya. Orang-orang luar negeri bisa marah dan naik pitam, tetapi tidak disebutkan mengamuk (*making amok*). Orang Rwanda bisa saling bunuh, tetapi sepertinya ada kesadaran ideologis tertentu untuk membunuh hanya karena perbedaan suku bangsa. Tetapi amuk khas Nusantara cukup spesifik. Masyarakat kita memiliki karakter tidak mudah dikendalikan (*uncontrollable*), tetapi mudah menyesal. Mudah melepas kontrol, tetapi mudah pula mendapatkan kontrol itu kembali untuk kemudian menyesali segala akibat dari amuk (Muhammad Sofyan, 1999: 43-44).

Tesis Romo Mangun tersebut kiranya cocok untuk menggambarkan situasi dan kondisi amuk massa salah satu pendukung partai yang merusak Kantor PEMDA Bali. Mereka juga membakar kendaraan-kendaraan yang ada di situ, dan merobohkan pepohonan di depan rumah-rumah penduduk di sekitar jalanan kota Bali. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah pemimpin mereka gagal menempati posisi *top leader* di negeri ini dalam Sidang Umum sekitar 1 tahun yang lalu. Dilihat dari sisi ini, karakter seperti tergambar di atas mendapat celah masuk untuk melampiaskan perilaku anarkisme massal. Setelah melakukan, dengan cepat pula mereka menyesali akibat perilakunya.

Secara sosiologis, dapat dijelaskan bahwa perilaku anarkisme kolektif di muka tidak bisa dilepaskan dari adanya proses transisi multidimensional. Masa transisi seiring dengan

perubahan sosial yang sangat mendasar dan menyeluruh menyentuh hampir semua aspek kehidupan di negeri ini, membawa konsekuensi yang sangat besar bagi masyarakat.

Bila dilihat dari dimensi domestik, terdapat masa transisi dari masa yang sebelumnya tertutup menjadi serba terbuka. Orang tidak sekedar bebas mengutarakan aspirasinya, lebih dari itu juga bebas menyatakan identitasnya, baik identitas politik, maupun identitas primordialnya. Akibatnya, benturan antar identitas-pun sangat rentan terjadi. Ketika

benturan itu tidak terkontrol, pecahlah amuk massa. Sasarannya ialah atribut-atribut identitas lawan (Muhammad Sofyan, 1999: 53). Atribut-atribut identitas lawan itu bisa berupa identitas agama seperti tempat ibadah: masjid, pura, klenteng, gereja, dan semacamnya. Bisa jadi atribut identitas itu berupa sentra-sentra ekonomi etnis lain seperti toko-toko "pecinan" yang dijadikan sasaran amuk massa. Tak terkecuali atribut identitas partai seperti kantor

partai, bendera partai, bahkan pemimpin partai yang dijadikan sasaran pelampiasan amuk massa.

Dalam kondisi seperti itu, terjadilah disorganisasi yang bisa memperparah krisis. Pada keadaan demikian, dijumpai suatu *anomie* yaitu suatu keadaan di mana tak ada pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga anggota-anggotanya tidak mampu mengatur tindakan-tindakannya, oleh karena batas-batas tidak ada (Soejono Soekanto, 1997: 375). Keadaan *anomie* inilah yang memungkinkan peristiwa tindak kekerasan

Masyarakat kita memiliki karakter tidak mudah dikendalikan (*uncontrollable*), tetapi mudah menyesal. Mudah melepas kontrol, tetapi mudah pula mendapatkan kontrol itu kembali untuk kemudian menyesali segala akibat dari amuk

massa itu mudah terjadi. Dan apalagi unsur sentimen agama masuk di dalamnya, maka dalam situasi seperti ini batas antara agama dengan kekerasan sangatlah tipis.

Sementara bila dibaca dari perspektif global, masyarakat negeri ini sedang berada di era transisi dari kultur agraris menuju sistem ekonomi global. Transisi ini, mengalami proses

yang paradoksal. Masyarakat kita "gagap" melihat perubahan-perubahan global yang sangat cepat itu. Ketika perekonomian sedang menuju satu titik universal (pasar bebas), justru ada indikasi menguat gejala tribalisme (kesukuan). Tentu saja, paradoks itu melambangkan sebuah konflik. Meminjam istilah Samuel Huntington, ada semacam benturan peradaban (Muhammad Sofyan, 1999: 53).

Pada prinsipnya, berbagai perbedaan bukanlah akar terjadinya tindak kekerasan. Tetapi manusialah yang acapkali salah dalam memaknai perbedaan itu. Sebab perbedaan merupakan *order of natur* atau *sunmatullah* (hukum alam) dalam bahasa Islam. Perbedaan adalah sesuatu yang alami. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya, jika bumi dan langit beserta isinya ini semuanya sama. Tentu tidak ada dinamika, tidak ada kerjasama, bahkan tidak ada persaingan (dalam arti positif). Hidup ini pasti sangat menjenuhkan.

Kontribusi Agama Bagi Perdamaian

Pada prinsipnya, berbagai perbedaan bukanlah akar terjadinya tindak kekerasan. Tetapi manusialah yang acapkali salah dalam memaknai perbedaan itu. Sebab perbedaan merupakan *order of natur* atau *sunmatullah* (hukum alam) dalam bahasa Islam. Perbedaan adalah sesuatu yang alami. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya, jika bumi dan langit beserta isinya ini semuanya sama. Tentu tidak ada dinamika, tidak ada kerjasama, bahkan tidak ada persaingan (dalam arti positif). Hidup ini pasti sangat menjenuhkan.

Oleh karena itu, persoalannya terletak dari bagaimana cara pandang kita terhadap adanya berbagai perbedaan itu. Islam misalnya, memandang perbedaan sebagai rahmat bagi

sekalian alam (*rahmatan lil alamin*). Konsekuensinya, ajaran Islam tidak pernah dan tidak akan pernah membolehkan pemaksaan dalam beragama. Islam memandang manusia sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Oleh karenanya, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti: persamaan (*al-musawah*) kasih sayang (*al-rahman-al-rakim*), keadilan (*al-adl*), dan sebagainya. Lewat nilai-nilai universal inilah mestinya peradaban dunia kita bangun. Bukan sebaliknya, dunia ini diruntuhkan karena kita saling berbeda. Islam dalam al-Quran (Q.S. Al-Maidah: 48) mengajarkan: "berlombalah kalian semua dalam hal kebajikan" (*fastabiqul khairat*). Perintah ini sangat relevan karena kita hidup dalam perbedaan dan masyarakat yang plural.

Karena itu adanya pluralitas bukanlah bencana, dan banyaknya agama itu merupakan kehendak Tuhan. Sebagaimana firmanNya: "...*kalaupun tidak karena perlindungan Allah kepada manusia antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, niscaya sudah diruntuhkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah* ...".

Tetapi kenapa serentetan peristiwa menyedihkan itu bisa terjadi? Dr. Alwi Syihab pernah berkata, bahwa tak ada satupun agama di dunia ini menganjurkan umatnya menghancurkan umat dan fasilitas ibadah agama lain. Apalagi, katanya, jika mereka mengklaim tindakan anarkis itu dilakukan atas dasar perintah agama. Kalaupun itu terjadi juga,

sebabnya tidak lain karena penyimpangan umat beragama itu sendiri (Tekad, 14 Pebruari 1999 dalam Mohammad Sofyan, 1999: 84-85). Karena itulah, umat beragama perlu belajar mengakui dan menerima berbagai perbedaan dalam hal beragama. Apalagi agama-agama yang ada di Indonesia, sama-sama menyebut nama Tuhan walau dengan bahasa yang berbeda-beda, dan sama-sama memperjuangkan perdamaian dan kasih sayang.

Namun demikian tidaklah cukup hanya dengan mengakui adanya perbedaan (baca: pluralisme) dalam banyak hal. Tetapi semestinya sekaligus kita terlibat dalam perbedaan itu. Artinya, walaupun kita tahu ada perbedaan, dan mengakui adanya perbedaan itu, --bila kita tidak berusaha melibatkan diri dalam perbedaan tersebut-- tentu tidak akan banyak membantu terciptanya perdamaian universal. Sebagai misal, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ada contoh menarik. Di sana berbagai simbol agama dan kebudayaan ada di dalamnya. Ada Masjid, Pura, Gereja, Klenteng, dst. Demikian pula ada bangunan mini rumah adat Jawa, Minangkabau, Timor-Timur dan sebagainya. Kemajemukan ini tidak akan membawa dampak positif, jika masing-masing penghuninya hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mau terlibat dengan suka-duka saudaranya yang lain. Tidak ada interaksi dan komunikasi dengan pihak lain, mereka hanya mau berurusan dengan dirinya sendiri dan dengan siapa yang dianggap sama dengan dirinya. Walaupun tetangganya lapar mau mati, bila mereka itu di luar agama, etnis, atau rasnya, dia tidak mau peduli.

Contoh konkrit keterlibatan Nabi Muhammad Saw. dalam pluralitas itu adalah ketika beliau membangun kota Madinah. Setelah beliau bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar sukses membangun masjid pertama kali di Madinah, beliau menyatukan berbagai suku

dan agama yang ada dan hidup di daerah itu. Sebab masyarakat/negara Madinah tidak akan berdiri kokoh, jika tidak di dukung oleh seluruh komponen masyarakat yang ada. Karena itulah beliau memelopori penandatanganan naskah kerjasama perdamaian dengan suku-suku yang ada di sana. Dari sini lahirlah apa yang populer dikenal dengan nama Piagam Madinah. Tercatat dalam buku *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kebidupan Zaman Nabi* (Akram Dhiyauddin Umari, terj. Mun'im A. Sirry, 1999: 37) teks dokumen perjanjian antara kaum Muslim dengan seluruh lapisan masyarakat Madinah (Muhajirin, Ansar, Yahudi Bani Auf, Yahudi Banun-Najjar, Yahudi Banul-Harits, Yahudi Bani Sa'idah, Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani al-Aus, Yahudi Bani Tsa'labah, dan lain-lain) yang berisi 47 pasal. Intinya adalah pengakuan bahwa mereka adalah satu komunitas (*ummah*) yang wajib menjaga keamanan dan menciptakan kesejahteraan bersama tanpa saling merasa terganggu.

Dari sinilah ada kata kunci yang bisa kita jadikan pegangan, yaitu: kemajemukan, perbedaan, dinamika, keterlibatan, interaksi, komunikasi, dan jalan-jalan alternatif. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, karena itu wajar jika muncul adanya perbedaan-perbedaan (SARA). Justru dengan adanya perbedaan inilah akan terjadi dinamika. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu memerlukan bantuan pihak lain, karena dirinya sendiri tidak akan mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa uluran pihak lain. Karena itulah manusia yang hidup dalam satu bangsa, tidak bisa menutup diri. Karena sesungguhnya bangsa yang menutup diri tidak akan cepat maju, misalnya Korea Utara yang dulunya eksklusif itu.

Atas dasar itulah, manusia perlu terlibat dalam kemajemukan, berinteraksi dengan sesamanya. Dan apabila dalam berinteraksi

menemui keganjilan-keganjilan, perlu diselesaikan dengan jalan komunikasi (dialog) tanpa kekerasan. Disinilah letak betapa sesungguhnya tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita pecahkan, asalkan mau berkomunikasi. Jalan-jalan alternatif masih banyak yang bisa kita lewati untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dan agama, menawarkannya kepada kita untuk menciptakan perdamaian itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram Dhiyauddin Umari, Prof., Dr., *Masyarakat Madani (Tinjauan Historis Kehidupan Nabi)*, terj. Mun'im A. Siry, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Andito, ed., *Atas Nama Agama Wacana Dalam Dialog "Bebas" Konflik*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998.
- Azyumardi Azra, Dr., *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga post-Modernisme*, Paramadina, Jakarta, 1996.
- D. Hendropuspito, O.C., Drs., *Sosiologi Agama*, Kanisius, Jakarta, 1996.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Saduran Drs. Alimandani, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Muhammad Sofyan, *Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.
- M. Amin Abdullah, Dr., *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram dan Titi Sobari, edisi keenam, jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Said Agiel Siradj, Dr., KH., ceramah ilmiah dalam rangka "Kuliah Tamu" di STAIN Malang, Sabtu, 29 Juli 2000.
- Soejono Soekanto, Prof. Dr., S.H., M.A., *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-24, 1997.